

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

### **1. Identifikasi Perkembangan Harga**

Perkembangan harga di Kabupaten Ciamis selama Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan dinamika yang cukup *signifikan* dengan pola perubahan yang beralih dari deflasi ke inflasi. Pada bulan Januari, harga cenderung mengalami penurunan yang konsisten dari minggu ke minggu. Nilai Indeks Perubahan Harga (IPH) tercatat berada pada kisaran negatif, yaitu sekitar -2,38% pada minggu pertama, kemudian menurun lebih dalam menjadi -2,99% pada minggu kedua, dan mencapai -3,39% pada minggu ketiga. Kondisi ini mencerminkan terjadinya deflasi yang relatif kuat pada awal tahun.

Memasuki bulan Februari, terjadi perubahan arah pergerakan harga dari deflasi menuju inflasi. IPH mulai menunjukkan nilai positif, yang mengindikasikan adanya kenaikan harga secara umum. Pada minggu pertama Februari, IPH tercatat sekitar 0,92% dan terus meningkat menjadi 1,04% pada minggu kedua, serta mencapai 1,68% pada minggu ketiga. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan harga setelah periode penurunan di bulan sebelumnya, dengan tren yang meningkat secara bertahap.

Selanjutnya, pada bulan Maret, perkembangan harga menunjukkan kecenderungan inflasi yang lebih tinggi meskipun bersifat fluktuatif antar minggu. IPH tercatat sebesar 2,27% pada minggu pertama, kemudian menurun menjadi 0,42% pada minggu kedua, dan kembali meningkat pada minggu ketiga hingga minggu kelima dengan nilai masing-masing sekitar 1,35%, 2,20%, dan 2,41%. Secara umum, bulan Maret ditandai dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, sekaligus menunjukkan pola pergerakan harga yang dinamis.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

### **1. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah:**

Pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis dihadapkan pada sejumlah tantangan yang bersumber dari faktor eksternal, khususnya terkait karakteristik komoditas pangan yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Beberapa komoditas strategis seperti beras, daging sapi, dan sebagian komoditas hortikultura tidak sepenuhnya dipenuhi dari produksi lokal, sehingga fluktuasi harga di tingkat provinsi maupun nasional secara langsung memengaruhi harga di Ciamis. Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu turut memengaruhi produksi pertanian lokal, terutama komoditas cabai dan sayuran, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan harga di pasar. Kondisi ini diperparah dengan adanya momen musiman seperti menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya yang meningkatkan tekanan permintaan.

Dari sisi internal, tantangan utama di Kabupaten Ciamis terletak pada aspek distribusi dan

infrastruktur pendukung. Sebaran wilayah yang cukup luas dengan kondisi geografis yang beragam menyebabkan distribusi bahan pangan dari sentra produksi ke pasar menjadi kurang efisien. Keterbatasan fasilitas penyimpanan, seperti gudang berpendingin (*cold storage*), juga menyebabkan komoditas mudah rusak dan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu lama, sehingga memperbesar risiko fluktuasi harga. Di samping itu, sistem informasi harga dan ketersediaan stok yang belum sepenuhnya terintegrasi secara *real-time* menjadi kendala dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang responsif dan berbasis data.

Selain faktor struktural, perilaku pasar dan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Ciamis juga menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi. Permintaan yang cenderung meningkat secara signifikan pada periode tertentu, terutama terhadap komoditas pangan utama seperti beras, telur ayam ras, dan cabai, seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan pasokan yang memadai. Di sisi lain, masih terbatasnya diversifikasi konsumsi pangan membuat tekanan harga terfokus pada komoditas tertentu. Praktik penahanan stok oleh sebagian pelaku usaha dalam kondisi tertentu juga berpotensi memperburuk kenaikan harga. Oleh karena itu, pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis memerlukan upaya yang terintegrasi, baik melalui penguatan produksi lokal, perbaikan distribusi, maupun pengendalian ekspektasi pasar.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

#### 1. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah:

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis selama Triwulan I Tahun 2026 difokuskan pada penguatan pengawasan harga dan intervensi pasar melalui kegiatan konkret yang bersifat langsung menyentuh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) pasar sebanyak empat kali di Pasar Manis Ciamis, yaitu pada tanggal 6 Januari, 23 Februari, 2 Maret, dan 12 Maret 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok secara langsung, serta memastikan tidak terjadi praktik penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, sidak pasar cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga pada komoditas tertentu, terutama dengan memberikan sinyal kepada pelaku usaha agar tetap menjaga kewajaran harga.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis juga melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak enam kali selama periode Februari hingga Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai lokasi strategis, antara lain pada 13 Februari di halaman UPTD Pengujian Kendaraan Dishub, 3 Maret di Alun-Alun Ciamis, 10 Maret di halaman GOR Desa Sadananya, serta 13 Maret di halaman Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan dan halaman Polsek Ciamis. Dalam pelaksanaannya, GPM menyediakan berbagai komoditas pangan strategis dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Berdasarkan laporan kegiatan dan respon masyarakat, program ini dinilai efektif dalam menekan lonjakan harga, khususnya menjelang periode meningkatnya permintaan, serta membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Lebih lanjut, pemberian subsidi melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) yang dilaksanakan

pada GPM tanggal 13 Februari turut memperkuat efektivitas intervensi harga. Kebijakan ini berperan dalam menurunkan biaya distribusi sehingga harga jual kepada masyarakat dapat ditekan lebih rendah. Secara keseluruhan, kombinasi antara pengawasan melalui sidak pasar dan intervensi melalui GPM serta FDP menunjukkan dampak yang cukup positif terhadap stabilitas harga di Kabupaten Ciamis. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui perluasan cakupan lokasi, peningkatan frekuensi kegiatan, serta penguatan sistem monitoring berbasis data agar pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

##### **1. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah:**

Evaluasi terhadap kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis selama Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak positif, khususnya dalam menjaga stabilitas harga pada periode transisi dari deflasi ke inflasi. Pelaksanaan sidak pasar secara berkala terbukti efektif dalam meningkatkan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok, serta meminimalisir potensi praktik penimbunan dan spekulasi harga. Sementara itu, kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan di beberapa titik strategis mampu memberikan akses kepada masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau, sehingga membantu menjaga daya beli, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Pemberian subsidi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) juga berkontribusi dalam menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu menjadi perhatian. Cakupan pelaksanaan GPM dan intervensi pasar masih terbatas pada lokasi tertentu, sehingga belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Ciamis yang memiliki karakteristik geografis beragam. Frekuensi kegiatan yang relatif terbatas juga belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika pergerakan harga yang bersifat cepat dan fluktuatif. Selain itu, pelaksanaan sidak pasar cenderung bersifat reaktif terhadap kondisi harga, sehingga belum sepenuhnya didukung oleh sistem peringatan dini berbasis data yang kuat. Keterbatasan infrastruktur distribusi dan fasilitas penyimpanan juga masih menjadi kendala dalam menjaga kestabilan pasokan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengendalian harga.

Berdasarkan evaluasi tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ke depan. Pertama, perluasan jangkauan dan peningkatan frekuensi GPM agar intervensi harga dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Kedua, penguatan sistem informasi harga dan ketersediaan pangan berbasis digital yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat. Ketiga, peningkatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha dan distributor, untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan dan fasilitas logistik juga perlu menjadi prioritas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis dapat dilakukan secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## 1. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah:

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis ke depan perlu disusun secara berbasis data dengan mempertimbangkan pola perkembangan harga Triwulan I Tahun 2026 yang menunjukkan pergeseran dari deflasi pada Januari menuju inflasi yang meningkat pada Februari hingga Maret. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem *early warning system (EWS)* berbasis data harga harian dan ketersediaan stok komoditas strategis. Pemerintah daerah melalui TPID disarankan mengembangkan *dashboard* monitoring harga yang terintegrasi dengan data pasar, distributor, dan produsen lokal, sehingga potensi lonjakan harga dapat diantisipasi lebih dini. Selain itu, analisis proyeksi inflasi perlu dilakukan secara berkala, khususnya menjelang periode rawan seperti Ramadan dan hari besar keagamaan, agar intervensi kebijakan dapat dilakukan secara tepat waktu.

Selanjutnya, penguatan sisi pasokan (*supply side*) menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu mendorong peningkatan produksi komoditas pangan strategis berbasis potensi lokal, seperti cabai, telur ayam ras, dan komoditas hortikultura lainnya, melalui program *intensifikasi* dan perluasan area tanam. Di sisi lain, kerja sama antar daerah (KAD) perlu diperluas untuk menjamin ketersediaan pasokan komoditas yang tidak dapat dipenuhi secara lokal. Optimalisasi kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga perlu dilakukan dengan meningkatkan *frekuensi*, memperluas lokasi hingga ke wilayah kecamatan, serta memastikan ketepatan sasaran kepada kelompok masyarakat rentan. Dukungan kebijakan seperti subsidi distribusi (FDP) sebaiknya diperluas pada periode tekanan inflasi tinggi untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Dari aspek distribusi dan kelembagaan, diperlukan perbaikan sistem logistik dan penguatan koordinasi lintas sektor. Pembangunan dan optimalisasi fasilitas penyimpanan seperti gudang dan *cold storage* menjadi penting untuk mengurangi risiko fluktuasi harga akibat keterbatasan pasokan. Selain itu, peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, Bulog, dan stakeholder lainnya perlu diperkuat dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga. Edukasi kepada masyarakat terkait diversifikasi konsumsi pangan juga perlu ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu yang rentan berfluktuasi. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara penguatan data, peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan pengendalian permintaan, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis diharapkan menjadi lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.